

RENCANA AKSI TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	RENCANA AKSI	TARGET RENAksi	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN TRIWULAN KE-				KET
									1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
○	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	75.00%										
A.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	84%				552,079,550						
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	4 Dokumen				512,079,550						
a.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	Perlunya keikutsertaan stakeholder dalam merumuskan pemecahan masalah pembangunan	1) Melaksanakan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD 2) Melaksanakan Pembekalan Faskel Musrenbang tahun 2026	1) 2 Kali ; 2) 16 Kelurahan dan 2 Kecamatan	100,000,000	Bidang PMEIP	√			√	
b.	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	6 Dokumen	Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka perlu melakukan koordinasi dengan OPD di lingkup Kota Padang Panjang, sehingga masalah inkonsistensi antar dokumen dapat teratasi	1) Melaksanakan Pendampingan Pelaksanaan Musrenbang (Kelurahan, Kecamatan), FKP RKPD , Musrenbang RKPD 2026 2) Melaksanakan Desk Renja-PD 2026 3) Melaksanakan Desk Renja-PD Perubahan 4) Melaksanakan FKP RPJMD dan Musrenbang RPJMD 2025-2029 5) Melaksanakan Orientasi Renstra-PD, Desk Renstra-PD 2025-2029	1) Dokumen RKPD 2026 2) Dokumen Renja-PD 2026 3) Dokumen RKPD-P 2025 dan Dokumen Renja-PD-P 2025 4) Dokumen RPJMD 2025-2029 5) Dokumen Renstra-PD 2025-2029	412,079,550	Bidang PMEIP	√	√	√	√	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	87%				10,000,000						
c.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Agar Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dapat berjalan secara sistematis dan terarah sesuai alur perencanaan serta untuk meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan pengelolaan Sistem informasi Data, Evaluasi dan Perencanaan pembangunan dengan baik	1) Penyusunan Renaksi Satu Data 2) Pelaksanaan Forum Data 3) Penggunaan aplikasi SIPD-RI dalam Penyusunan Data	1) 1 Laporan Renaksi Satu Data 2) 1 Kali Forum Data 3) 1 Aplikasi	10,000,000	Bidang PMEIP	√	√	√	√	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	4 Dokumen				15,000,000						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
d.	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	1) Masih belum optimalnya PD dalam melakukan evaluasi dan penilaian realisasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja dan Renstra 2) Untuk mengetahui kendala dan permasalahan serta memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan	1) Melakukan desk hasil evaluasi renja dan renstra Perangkat Daerah 2) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1) 2 kali desk 2) 9 laporan	15,000,000	Bidang PMEIP	√	√	√	√	
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul				15,000,000						
e.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	41 Urusan	Agar element data yang telah di tetapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan	1) Terlaksannya Pengelolaan SIPD -RI pada Dokumen Perencanaan 2) Pengelolaan Aplikasi SIPD-RI (Sosialisasi Pokir, Musrenbang Kelurahan, RKPD, Renja PD, RKPD-P, Renja PD-P, RPJMD, dan Renstra PD)	1 Aplikasi	15,000,000	Bidang PMEIP	√	√	√	√	
B.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	88%				159,847,950						
5.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88%				75,000,000						
f.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	Evaluasi merupakan upaya dalam membuat target pembangunan yang rasional, sehingga mekanisme evaluasi merupakan salah satu metode yang wajib untuk diterapkan	1) Menyusun Mekanisme pelaksanaan evaluasi mulai dari analisa dokumen serta pengumpulan permasalahan yang dihadapi, serta Desk Evaluasi pelaksanaan perencanaan. 2) Melaksanakan koordinasi dalam kebijakan serta mengawal konsistensi program dan kegiatan OPD dalam percepatan penurunan stunting	1) 1 Laporan 2) 1 Kali	35,000,000	Bidang PMSBP	√	√	√	√	
g.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	1) Evaluasi merupakan upaya dalam membuat target pembangunan yang rasional, sehingga mekanisme evaluasi merupakan salah satu metode yang wajib untuk diterapkan 2) Strategi, arah kebijakan serta ketepatan penanganan kemiskinan sangat bergantung kepada tingkat validitas data kemiskinan.	1) Menyusun Mekanisme pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan mulai dari analisa data tahapan penyusunan dokumen, serta Desk pelaksanaan perencanaan penyusunan dokumen perencanaan. 2) Pengembangan Inovasi Satu Data Kemiskinan serta penyusunan Proses Bisnis Pengelolaan Kemiskinan.	1) 1 Laporan 2) 1 Inovasi	40,000,000	Bidang PMSBP	√	√	√	√	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawahbidang perekonomian dan SDA	88%				34,847,950						
h.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	1) Belum optimalnya koordinasi dan sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan di lingkup Bidang SDA 2) belum optimalnya koordinasi lintas sektor di lingkup Bidang SDA	1) Melaksanakan rapat koordinasi terkait dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Renja OPD/Renstra/RPJMD di lingkup Bidang SDA 2) melaksanakan rapat Koordinasi dan rapat teknis terkait sektor perumahan, Permukiman dan Ekonomi (Pokja PKP, Forum PKP, Forum Koordinasi RAD PG)	1) 8 OPD 2) 6 kali	34,847,950	Bidang ESDAI	√	√	√	√	
7.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	88%				50,000,000						
i.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	1) Belum optimalnya koordinasi dan sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan di lingkup Bidang Kewilayahan 2) Belum optimalnya fasilitasi dalam implementasi kebijakan satu peta, dan koordinasi dan monitoring pemberdayaan masyarakat kelurahan serta koordinasi lintas sektor irigasi.	1) Melaksanakan rapat koordinasi terkait dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Renja OPD/Renstra/RPJMD di lingkup Bidang Kewilayahan 2) Melaksanakan fasilitasi Penginapan Data Spasial ke Serambi Geoportal Kota Padang Panjang dan Fasilitasi Penilaian bhumandala award Inovasi 2025 3.Melaksanakan Rapat koordinasi/monev pemberdayaan kelurahan dan penilaian Perakat Award 2025 4.Melaksanakan rapat koordinasi komisi irigasi	1) 3 OPD 2) 23 OPD 3) 2 kali rakor, 1 kali penilaian untuk 16 Kelurahan 4) 2 kali sidang	50,000,000	Bidang ESDAI	√	√	√	√	
○	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif										
C.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	4 Dokumen 74%				317,500,000						
9.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen				22,500,000						
j.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan	1 Dokumen	Masih belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman terkini di bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Melaksanakan Diskusi Aktual di bidang Pendidikan dan Kebudayaan (tema disesuaikan dengan kondisi terkini)	1 Diskusi Aktual	22,500,000	Bidang LitBang		√	√	√	
10.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen				215,000,000						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
k.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Masih belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman terkini di bidang ekonomi dan pembangunan	Melaksanakan Diskusi Aktual di bidang ekonomi dan pembangunan dengan tema kondisi terkini	1 Diskusi Aktual	215,000,000	Bidang LitBang		√	√		
11.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%				80,000,000						
l.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1. Belum optimalnya koordinasi penyusunan rencana aksi inovasi daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, mulai dari proses inisiasi, implementasi, update, dan upgrade inovasi, maupun proses monev-nya. 2. Program dan/atau kegiatan pada OPD belum sepenuhnya menginternalisasikan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. 3. Identifikasi implementasi inovasi daerah masih terbatas hanya pada perangkat daerah.	1. Memperkuat peran Tim Inovasi Daerah; 2. Mengoptimalkan pendampingan inovasi pola hibrida dengan memanfaatkan aplikasi dianasari; 3. Monev terhadap komitmen 1 program 1 inovasi. 4. Apresiasi terhadap OPD yang berhasil melaksanakan inovasi. 5. Menjaring inovasi yang berasal Kelurahan, SMP, UPTD, dan Masyarakat	128 Inovasi	80,000,000	Bidang LitBang	√	√	√	√	

Padang Panjang, 2 Januari 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG



ARGUS SAADAT, S.Sos, M.Si
NIP. 19721010 199303 2 001